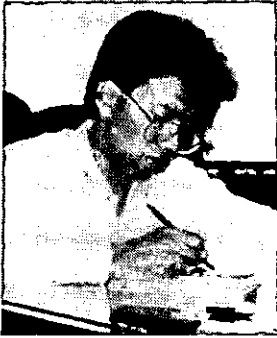


Strategi Pembangunan Industri Indonesia (Analisis Kebijakan dan Perspektif Industri Masa Depan)

Oleh : Suharno Rusdi



SUHARNO RUSDI, lahir di Pekalongan 20 Juni 1960, alumnus Fakultas Teknik Ull tahun 1984. Dan S-3 diselesaikan di University Of New South Wales Australia pada tahun 1984. Saat ini sebagai dosen tetap pada almamaternya. Selain itu sebagai Konsultan pada Industrial Restuncturing Proyek Wold Bank Departemen Perindustrian R.I. dan R & D PT. Polysindo Eka Perkasa.

Pendahuluan

Berbicara mengenai Strategi, sadar atau tidak, sesungguhnya kita membicarakan tentang masa depan, terlebih lagi, kalau kita kaitkan dengan *Pembangunan Industri Indonesia* dalam menyongsong era tinggal landas nanti, berarti kita membicarakan suatu masalah besar.

Telah dimengerti oleh kita semua, bahwa pada era tinggal landas nanti, dunia akan dihadapkan dengan zaman modernisasi dan globalisasi. Pada masa itu, akan tumbuh suatu kehidupan baru dan jaringan teknologi sejagat berukuran besar yang melintas batas-batas negara. Modernisasi dan globalisasi demikian akan menempatkan

bumi ini sebagai planet yang satu, di mana hubungan antar manusia dan antar negara sebagai hubungan saling ketergantungan, karena gaya hidup yang demikian, seolah-olah tak ada satu zarahpun kehidupan di muka bumi ini betul-betul seratus persen mandiri.

Globalisasi, bukan saja akan melanda kehidupan di sektor ekonomi, melainkan juga akan masuk kedalam kehidupan di sektor teknologi, malahan ada yang mengklaim justru karena teknologi itulah gaya hidup global tak bisa terhindarkan. Dengan kaidah Supply and Demand, adanya globalisasi ekonomi dan teknologi akan memunculkan era baru yang disebut era industrialisasi dunia ke II.

Jika dibandingkan dengan era

industrialisasi dunia ke I yang telah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, para peramal masa depan mengatakan bahwa, ada perbedaan yang sangat mencolok pada era industrialisasi dunia ke II, yakni bergesernya sentra-sentra *industri* yang semula berada di negara barat (Eropa dan Amerika) beralih ke daratan negara-negara Asia, termasuk Indonesia.

Pertanyaannya adalah kiat apakah yang akan dan harus dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi era yang digambarkan diatas. Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita perlu melakukan analisis, prediksi, dan estimasi, terhadap data-data yang ada dilapangan, dan hasil perencanaan pakar-pakar Pembangunan, membaca kecenderungan, kemauan dan tuntutan masyarakat (dunia), untuk itu tulisan ini akan menyajikan : Tinjauan sekilas kebijaksanaan pemerintah mengenai pembangunan industri nasional dan perkembangannya hingga sekarang, serta perspektif di masa yang akan datang.

Kebijaksanaan Pembangunan Industri Nasional

Sudah sering kita dengar bahwa kebijaksanaan pembangunan pemerintah Indonesia dalam Repelita I yang sedang berjalan ini adalah, dimaksudkan untuk *meletakkan dan memantapkan kerangka landasan sebagai persiapan tinggal landas* pada Repelita II yang akan datang.

Untuk itu sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pemerintah menetapkan bahwa strategi pembangunan nasional dalam Repelita I adalah untuk mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara sektor industri dan pertanian. Ini berarti bahwa pembangunan sektor industri dilaksanakan paralel dengan pembangunan pertanian.

Dalam pembangunan jangka panjang tahap ke dua nanti, GBHN juga menegaskan bahwa, strategi pembangunan nasional harus mengalami perubahan, yakni yang semula

sektor industri ditumbuh kembangkan sejajar dengan sektor pertanian, dalam Repelita ke II nanti sektor industri akan diarahkan untuk menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Ini berarti bahwa sektor industri merupakan kekuatan utama dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Pertanyaannya adalah, sektor industri yang berpenampilan seperti apakah yang akan mampu menjadi tulang punggung dan penopang pembangunan ekonomi nasional nanti.

Namun demikian sebelum kita membicarakan performa dan strategi industri nasional di masa datang yang lebih rinci, kita akan tinjau sekilas tentang kebijaksanaan pembangunan industri nasional yang sekarang sedang berjalan.

Jika kita amati dengan seksama, sesungguhnya kebijaksanaan pembangunan industri yang dijalankan pemerintah Indonesia sekarang ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok (aliran) policy makers. Kelompok pertama adalah yang dipelopori oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan rekan-rekannya dari Fakultas Ekonomi UI atau yang kita kenal sebagai Group Salemba. Kelompok kedua adalah Group BPPT yang dipelopori Prof. Habibi. Dan kelompok yang ketiga adalah Group Departemen Perindustrian atau Group Ir. Hartarto.

Menurut aliran Salemba group, pola pembangunan industri di Indonesia hendaknya dilaksanakan atas dasar kriteria keunggulan komparative (Comparative Advantages Criteria), artinya hanya subsektor industri yang mampu meningkatkan national foreign incomes sajalah yang harusnya dikembangkan di Indonesia.

Sedangkan group Perancang bangun dari BPPT lebih menekankan agar pembangunan industri di Indonesia dikembangkan ke arah sektor industri berteknologi tinggi (hi-tech). Menurut mereka, hanya dengan menggunakan teknologi canggih produk-produk Indonesia akan mampu bersaing di pasaran

Internasional, baik di bidang mutu maupun kuantitas. Dalam konsep mereka dijabarkan bahwa yang dimaksud teknologi canggih adalah teknologi yang mempunyai kriteria sbb :

- (i) Siklus masa produknya pendek (short product life cycle).
- (ii) memiliki daya saing yang kuat (tough Competition)
- (iii) sifat teknologinya cepat berubah (fast changing technology)
- (iv) membutuhkan modal investasi yang sangat besar (huge capital requirement), dan
- (v) full computerisasi (full computerization)

Untuk mengimplementasikan konsep industri hi-tech tersebut, kelompok Habibie kemudian mengklasifikasikan jenis industri menjadi dua jenis yakni *Industri Strategis* dan *Industri non Strategis*

Lain lagi dengan konsep para pakar yang bernaung di bawah lambang Departemen Perindustrian, menurut Hartarto group, Strategi pembangunan industri di Indonesia seharusnya diarahkan pada sektor-sektor yang saling mengkait. Dengan kata lain, hanya sektor industri yang mempunyai kaitan dengan sektor industri yang lain-lah yang seharusnya dikembangkan di Indonesia, konsep ini kita kenal sebagai *Industri* saling keterkaitan

Bagaimanakah dengan kenyataan yang kita lihat di lapangan saat ini ternyata, pemerintah tidak bisa memilih satu dari ketiga pilihan tersebut di atas, melainkan menggabungkan ketiga aliran tersebut, menjadi satu, kemudian melaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang didasarkan pada kondisi, kemampuan dan kebutuhan yang ada. Sebagai contoh, 'mungkin' ide Habibi adalah sangat ideal, tetapi kita harus jujur bahwa saat sekarang ini kita belum siap melaksanakan konsep yang bagus tersebut, mengingat sangat terbatasnya kemampuan

dana yang ada, mutu sumber daya manusia, dan fasilitas yang kita miliki. Sehingga dalam prakteknya, dapat kita katakan bahwa 'The sense of industrial policy in Indonesia, whatever sectors are able to be chosen because there is no the best choice but there is always the better choice'. ini barangkali ungkapan bernada kompromi dalam pengertian lain, Namun boleh jadi berarti semua aliran tersebut di atas adalah baik, serta bisa dan (harus) kita jalankan.

Bukti praktek dari sikap kompromi tersebut bisa kita lihat sekarang. Kelompok Habibie terus berjalan dengan Badan pengelola Industri Strategisnya yang 'mengakuisasi' berbagai industri raksasa nasional. Walaupun beberapa waktu yang lalu group Salemba melemparkan kritik bahwa industri-industri di bawah BPIS secara ekonomi tidak profitable, dan bahkan banyak menyedot tabungan devisa negara namun nyatanya kita saksikan bendera BPIS sekarang tetap berkibar.

Dengan pengelompokan industri strategis dan industri non strategis, juga timbul konotasi secara eksplisit, bahwa hanya industri pengguna teknologi tinggi, sementara industri-industri di luar BPIS dianggap pengguna teknologi rendahan yang murah dan gampang dipelajari.

Sementara itu Menteri Perindustrian dengan segenap aparatnya melaju di jalur lain dengan bendera industri keterkaitannya Departemen Perindustrian dalam menggelindingkan kebijaksanaannya membentuk sentra-sentra industri di berbagai daerah, mengklasifikasikan jenis industri menjadi berbagai kelompok industri kimia dasar, industri logam dasar, dan aneka industri yang terus ditumbuhkembangkan serta menumbuhsuburkan industri kecil, dan menciptakan lembaga-lembaga litbang terapan di berbagai tempat.

Untuk menciptakan kondisi yang kondusif berkembangnya sektor industri, Departemen Perindustrian bekerja sama

dengan kebijaksanaan hukum juga telah menelorkan berbagai deregulasi dan kebijaksanaan hukum seperti, Paket Oktober, Paket Januari dan yang berakhir adalah Paket juli, langkah-langkah tersebut menurut group Departemen Perindustrian merupakan suatu kesatuan dalam program pencapaian industri keterkaitan.

Analisis dan Perspektif

Implementasi kebijaksanaan-kebijaksanaan Industri seperti telah disebutkan di atas hasilnya bisa kita lihat sekarang, kita akui bahwa sumbangan sektor industri secara keseluruhan terhdap produksi nasional memang cukup besar, kalau pada REPELITA I tercatat hanya 9% sekarang sumbangan itu telah mencapai sekitar 21%.

Pada awal REPELITA I nilai tambah per kapita yang dihasilkan oleh sektor industri masih sangat kecil, yakni hanya 6,7 dollar Amerika per jiwa per tahun, sementara sekarang, nilai tersebut telah naik dengan tajam menjadi 137,2 dollar Amerika per jiwa per tahun yang berarti naik 20 kali lipat.

Namun demikian, jika disimak kondisi neraca pembayaran internasional kita dengan teliti, ternyata sumbangan sektor industri belum cukup berarti. Memang diketahui bahwa kondisi neraca pembayaran kita saat ini sudah "baik", tetapi hal itu bukan disebabkan oleh perkembangan sektor industri, melainkan karena adanya sokongan pinjaman luar negeri. Jumlah devisa Indonesia saat ini belum seimbang dengan kebutuhan devisa yang diperlukan untuk mendorong industri. Belum lagi kalau kita hitung-hitung antara devisa dari sektor industri dengan dana investasi pembelian mesin dan perlengkapan penunjang dari luar negeri, hal ini masih ada gap yang mencolok.

Industri Indonesia yang tumbuh sekarang ini adalah idustri yang didukung oleh sektor luar negeri, bukan dari dalam negeri. Apalagi

kalau kita lihat industri-industri yang dikelola BPIS, sampai saat ini kondisi perolehan devisanya masih belum seimbang dengan investasi yang ditanamkan. Data perolehan devisa hasil industri yang sering dipublikasikan pemerintah adalah dari sektor industri non strategi yang pembinaannya di bawah naungan Departemen Perindustrian. Kondisi seperti disebutkan di atas merupakan masalah yang harus kita pecahkan, terutama dalam tahap Pembangunan Jangka Panjang Tahap Ke dua nanti.

Pada tahap pembangunan jangka panjang yang ke dua nanti, Indonesia kan menghadapi tatanan dunia baru yang sama sekali lain dengan apa yang kita alami sekarang ini. Dunia " tanpa batas " itu bukan saja akan berubah dengan cepat, tapi juga akan semakin polar. Regionalisme ekonomi akan muncul dimana-mana yang menumbuhkan persaingan yang kuat, bahkan kadang mendekati kurang sehat, Standarisasi produk akan hilang, dan yang tumbuh adalah spesifikasi-spesifikasi pasar baru. Pada keadaan seperti itu informasi dan teknologi akan menjadi alat penentu. Hanya negara yang menguasai informasi dan tekonologi akan keluar dari kemelut suasana dunia yang serba tak menentu.

Dalam tatanan dunia yang seperti itu, Indonesia akan muncul sebagai kekuatan dunia apabila pembangunan sektor industrinya didukung oleh sistim informasi dan teknologi yang handal.

Kalau kita mau intropeksi, saat ini kita belum memiliki suatu himpunan informasi yang cukup rinci dan akurat mengenai potensi, struktur dan kegiatan industri di Indonesia. Data yang sekarang ada kerap kali hanya bersumber pada pengumpulan data stastistik yang dihimpun dengan metode "sampling" dan data dari BKPN saat pengusaha mengajukan aplikasi. Beberapa aspek industri seperti , jenis-jenis produksi,

kapasitaas terpakai, teknologi yang digunakan, persediaan barang, kebutuhan bahan baku, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tidak tercakup di dalamnya.

Sistim informasi industri terpadu (IIS) yang dimaksud adalah suatu database yang dilayani oleh komputer, dan dari database tersebut dapat dilakukan pertukaran informasi antara dunia industri, instansi pemerintah, pasar, dan juga para broker.

Beberapa negara maju seperti Inggris, Jerman, Jepang dan Korea Selatan telah menerapkan sistim informasi industri terpadu sejak beberapa tahun lalu. Bahkan sistim informasi itu kini telah disebar luaskan melalui satelit-satelit di beberapa negara yang "online" dengan komputer di beberapa kantor agen pembelian. Maka tidak perlu heran apabila kantor-kantor agen pembelian di Hongkong atau Singapura sekarang ini dibuka 24jam. Sebab dengan cara itu, mereka bisa dengan cepat menangkap peluang-peluang pasar Eropa, Amerika, dan Timur Tengah, kemudian diteruskan ke kantor-kantor sub agen pembelian di Jakarta, Surabaya, dan Bandung.

Saat sekarang banyak para penjual hasil industri Indonesia yang lebih suka datang ke Singapura atau Hongkong dari pada datang ke Jakarta atau ke Surabaya. Sebab di Singapura atau Hongkong ternyata informasi tentang industri Indonesia malah jauh lebih lengkap. Dan harap jangan terkejut pula kalau kita jalan-jalan di luar negeri mendapatkan kecap ABC atau rokok gudang Garam yang diekspor oleh eksportir negara tetangga. Inilah bukti ketertinggalan kita di bidang informasi yang menjadi ancaman terhadap pertumbuhan industri nasional. Cara-cara pemasaran hasil industri kita seperti digambarkan di atas, jelas akan mengurangi profitabilitas industri itu sendiri.

Disamping dituntut penguasaan informasi dunia, dalam era globalisasi dunia industri

Indonesia juga dituntut untuk berbuat lebih efisien dan produktif. Persaingan makin banyak baik dari kawasan ASEAN sendiri, maupun dari Cina, Vietnam dan bahkan India yang ekonominya makin terbuka di bawah pemerintahan Rao. Belum lagi jika diamati munculnya blok-blok perdagangan baru seperti Pasar tunggal Eropa dan Perjanjian Uruguay yang kita harapkan bisa menerobos sekat-sekat proteksionisme ternyata sampai saat ini belum tampak hasilnya, itulah sebabnya efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi suka atau tidak suka, harus terus ditargetkan, apapun kesulitan yang menghadang.

Efisiensi dan produktivitas kita perlukan, selain untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar Internasional, efisiensi juga harus diarahkan untuk menciptakan daya saing produk-produk Indonesia di dalam negeri. Jangan sampai terjadi, kita sibuk menggarap ladang orang lain, tapi ladang sendiri malah terbengkalai, apa lagi sampai digarap orang lain. Pada era dunia global kita perlu lebih menggalakkan peningkatan daya saing produk Indonesia di luar negeri. Jangan sampai pasar domestik yang ada malah lupakan, dan pula jangan sampai mengharapkan pemerintah untuk memberlakukan proteksi terhadap industri dalam negeri, sebab sikap bermanja-manja seperti itu sudah bukan zamannya lagi pada dekade mendatang. Era globalisasi adalah era total foot ball. Era globalisasi adalah era hilangnya pengkotakan-pengkotakan. Era globalisasi adalah era fair play. Oleh karena itu, dunia industri Indonesia akan maju apabila produk-produknya mampu bersaing dengan produk Internasional secara terbuka, dewasa dan sehat.

Untuk mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, pemerintah harus sedikit demi sedikit mau melonggarkan proteksi terhadap industri nasional, dan sekaligus mau memperlebar Keran impor. Perlindungan industri di dalam negeri tidak bisa dilakukan

terus menerus. Sekalipun diakui, bahwa perlindungan terhadap produk-produk di dalam negeri diperlukan, akan tetapi bila hal itu dilakukan tanpa batas waktu, dikhawatirkan akan mengakibatkan menurunkan tingkat efisiensi dan produktivitas industri itu sendiri. Jadi jangan sampai terjadi 'pagar makan tanaman'.

Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk kawasan proteksi pasar produk Indonesia, dunia industri Indonesia juga harus mampu mencari pangsa pasar baru di luar kawasan proteksi tersebut sambil terus meningkatkan daya saing produksinya di dalam negeri.

Saat yang akan datang bukan lagi waktunya industri kita menjadi tukang jahit, karena persaingan yang makin ketat, regionalisme ekonomi semakin meluas, dan isu global mengenai hak asasi manusia dan lingkungan hidup juga makin peka.

Agar mampu bersaing, para pelaku industri kita harus bersedia membuka toko di negeri orang. Itu berarti segala aspek baik aspek ekonomi maupun aspek non ekonomi harus dipertimbangkan secara teliti, hati-hati dan masak. Jadi maju mundurnya industri masa depan bukan hanya masalah efisiensi, produktivitas, ketepatan waktu pengiriman barang (just in time delivery), jaminan mutu (quality assurance), tanggap (quick respons), tapi juga perlu ketepatan dalam menentukanantisipasi.

Untuk mendukung kebijaksanaan industrialisasi pada TPJP II nanti, Indonesia juga perlu lebih berani melakukan liberalisasi dalam mengundang pemodal asing (PMA), jika hal ini tidak cepat dilakukan, bukan tidak mustahil investor asing akan berpaling ke negara-negara yang lebih menawarkan fasilitas yang menawan.

Memang kita akui ada beberapa kalangan masyarakat yang ketakutan adanya PMA yang kuat yang dikhawatirkan akan mendominasi ekonomi nasional. Menurut hemat saya kekhawatiran itu perlu dibuang jauh-jauh,

sebab, secara empirik PMA di beberapa negara lain bukan saja tidak mematikan dunia usaha domestik, tetapi justru malah memacu pertumbuhan ekonomi.

Sebagai bukti pernyataan di atas, bisa kita lihat di Cina Taipei yang kini sudah mampu memproduksi semikonduktor yang tergolong canggih di dunia. Dan keberhasilan itu dilakukan Cina Taipei melalui PMA. Para pekerja di sana menimba pengetahuan teknologi dan manajemen dari PMA tersebut. Contoh lain, di sektor industri tekstil di negara kita sendiri, sepuluh tahun lalu produsen polyester adalah hanya Tifico dan Indo Toray synthetic (ITS) keduanya PMA dari Jepang. Belajar dari kedua PMA Jepang tersebut, sekarang, banyak bermunculan produsen-produsen polyester domestik yang mengikuti jejak kedua PMA Jepang tersebut.

Memang kita punya pengalaman pahit dengan PMA yang pernah merugikan dunia industri domestik seperti yang terjadi pada dekade 70-an, tapi kita harus introspeksi, bahwa pada saat itu pemerintah kita memberikan proteksi yang berlebihan terhadap PMA. Akibatnya PMA kurang memberikan akses kepada pertumbuhan industri nasional. Saya yakin hal itu tidak akan terjadi persaingan dibiarkan melanda dunia usaha itu sendiri.

Dari pengalamannya saya bekerja disektor industri, saya yakin kehadiran investor asing turut mendorong pengusaha industri domestik memodernisasikan diri. Tambahan lagi, walaupun teknologi PMA kadang-kadang sering ditutup-tutupi, tapi toh tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada PMA tetap mendapat ilmu tambahan di tempat mereka bekerja terbukti sekarang ini banyak terjadi pengusaha domestik yang suka membajak tenaga kerja PMA.

Era globalisasi adalah era yang sangat mementingkan tingkat kecanggihan teknologi. Bagi Indonesia tidak ada pilihan lain, kecuali belajar dari kehadiran teknologi yang dibawa oleh investor asing. Dengan

memperoleh teknologi dan tenaga kerja yang terlatih, Industri Indonesia akan mempunyai kedudukan yang kuat.

Beberapa waktu yang lalu pemerintah telah mengeluarkan PP No. 17/1992 yang membolehkan PMA memiliki saham 100%. Namun demikian agaknya kebijaksanaan ini tidak akan mampu 100% menarik PMA untuk membuka usahanya di Indonesia, sebab dalam PP tersebut masih diikuti syarat hanya untuk daerah terpencil plus modal minimal 50 juta dollar Amerika (100 milyar rupiah). Persyaratan modal minimal 50 juta dollar AS untuk daerah terpencil adalah suatu hal yang sulit dipenuhi oleh PMA. Sebab selain investasi di daerah terpencil memerlukan biaya yang sangat besar, juga infrastrukturnya masih belum memadai.

Dalam era globalisasi, dunia industri Indonesia juga sudah tidak bisa lagi mengandalkan pada hasil-hasil industri yang daya saingnya didasarkan pada tenaga kerja yang murah. Sebab negara-negara lain seperti Vietnam, Cina, Ceko-Slowakia justru memiliki tenaga kerja yang jauh lebih murah.

Dengan berubahnya misi sektor industri Indonesia yang semula sebagai pendamping sektor pertanian menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional, maka kebijaksanaan pembinaan pun perlu disesuaikan. Jika pada beberapa dekade lalu dunia industri dituntut untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional (SI), maka pada dekade mendatang standar itu akan ditinggalkan, dan diganti dengan standar regional yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu dan berbeda antara satu region dengan region yang lain.

Dan yang tak kalah penting, dalam menghadapi era kebangkitan dunia kedua, dunia industri Indonesia harus ikut terlibat secara langsung dalam usaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, baik di bidang engineering, manajemen, teknoekonomik, maupun pemasaran. Sekarang ini kontribusi dunia industri kita

terhadap pengembangan lembaga-lembaga pendidikan tinggi masih dirasa sangat kurang, sementara itu di sisi lain dunia industri sering berteriak bahwa tamatan pendidikan tinggi kita belum siap pakai. Untuk mengantisipasi era tinggal landas, sudah waktunya kita mempersempit gap antara pendidikan tinggi dan dunia industri. Mungkin pihak pemerintah juga perlu turun tangan dalam mengatasi masalah ini, yakni dengan cara mengadakan rangsangan kebijaksanaan 'tax deductible' terhadap industri-industri yang nyata-nyata ikut terlibat dalam mengembangkan lembaga pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain, dunia pendidikan tinggi pun harusnya tidak hanya bersifat pasif menunggu bola. Kita lihat di lapangan sekarang, hampir tidak ada industri kelas menengah di Indonesia yang tidak menggunakan tenaga ahli asing. Hal ini membuktikan bahwa pada hal tertentu pendidikan tinggi kita belum mampu mencetak tenaga ahli yang dibutuhkan oleh dunia industri kita sendiri. Kendala seperti ini harus kita atasi 'bersama' antara dunia industri dan dunia pendidikan.

Untuk mempertahankan daya saing hasil produksinya, dunia industri Indonesia juga harus ikut mengembangkan dunia penelitian. Dalam era globalisasi sudah bukan waktunya lagi industri kita hanya sebagai 'penjiplak' atau membeli licency. Sebab hal ini berarti langkah kemunduran yang tidak efisien.

Kalau kita amati sekarang, ketergantungan industri Indonesia terhadap luar negeri yang paling mencolok adalah di sektor permesinan (teknologi), sehingga sektor inilah yang banyak menyedot devisa. Apalagi kondisi usia permesinan kita sekarang ini rata-rata di atas lima tahun. Oleh karena itu kebijaksanaan restrukturisasi, dan penumbuhan industri-industri mekanik perlu diperkuat. Hal ini perlu untuk mendukung kebutuhan suku cadang yang memang sejak sekarang sudah sangat kita rasakan. Era globalisasi adalah era dimana dunia industri

akan diwarnai oleh sistem otomatisasi. Untuk mempersiapkan tantangan ini Indonesia sudah saatnya sekarang untuk mempercepat penumbuhan industri-industri elektronika dan rekayasa.

Kesimpulan dan Saran-saran

Apabila memang pembangunan industri PJPK II ditargetkan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi, maka analisis keberhasilannya hendaknya diukur atas dasar kemajuan ekonomi. Kebijakan-kebijaksanaan pembangunan industri yang nyata-nyata tidak memberikan dampak terhadap peningkatan nilai ekonomi, maka perlu kiranya untuk ditinjau kembali.

Agar industrialisasi di Indonesia bisa tercapai, perlu kiranya kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan liberalisasi yang berkaitan dengan penumbuhan sektor industri perlu kiranya untuk terus dilanjutkan. Untuk mendukung cita-cita industrialisasi, Indonesia juga memerlukan sistem informasi industri yang handal dan arah dunia

pendidikan serta penelitian yang jelas. Di sisi lain, masyarakat industri Indonesia juga perlu dirangsang untuk terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mutu serta kepekaan terhadap permintaan pasar. Dengan kalimat singkat bisa dikatakan bahwa industri masa depan adalah 'industri pasar'. Hanya industri yang mampu menyesuaikan dengan permintaan pasarlah yang akan survive.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartarto, *Perkembangan Industri Nasional*, Journal Industri Edisi khusus PPI, Juli-Agustus, 1990, Hal. 10.
- Sumitro Djojohadikusumo, *Industri dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Habibie, B.J. *Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Bangsa*, BPPT, Jakarta, 1987.
- Davidson, J.J. *International Business and Global Technology*, Lexington, Toronto, 1983.
- Soeharto, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indoensia*, Kompas, 1992.